

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2025

IMB

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

COUNTER
08

COUNTER
09

COUNTER
10

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan karuniaNya sehingga Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah dapat diselesaikan.

Dokumen LKJIP DPMPTSP merupakan laporan akuntabilitas kinerja terkait keberhasilan dan atau kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2023-2026. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi mengenai kinerja, pencapaian, serta analisis kinerja yang mencakup evaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Laporan ini juga sebagai evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Laporan ini.

Banda Aceh, 5 Pebruari 2026

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



Faisal M. S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 197801011998101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Banda Aceh	1
1. Tugas, Pokok dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi.....	2
3. Sumber Daya DPMPTSP Kota Banda Aceh	4
B. Permasalahan Utama (<i>Strategis Issued</i>)	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Perjanjian Kinerja	12
C. Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	18
2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	30
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Tahun 2023-2026	35
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	35
5. Analisis proses/strategi yang berdampak terhadap efisiensi Anggaran	37
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Program yang menunjang IKU Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026).....	37
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	39
BAB IV PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Tahun 2025	4
Tabel 1. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan ABK.....	5
Tabel 1. 3	Jumlah ASN DPMPTSP berdasarkan Golongan	7
Tabel 1. 4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering	7
Tabel 1. 5	Sarana dan Prasarana DPMPTSP.....	8
Tabel 2. 1	Tujuan dan Indikator Tujuan DPMPTS Tahun 2025	11
Tabel 2. 2	Sasaran dan Indikator Sasaran DPMPTS Tahun 2025 ...	11
Tabel 2. 3	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025.....	13
Tabel 2. 4	Alokasi anggaran berdasarkan belanja DPMPTS Tahun 2025	14
Tabel 2. 5	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025	14
Tabel 2. 6	Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025	15
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3. 2	Capaian Tujuan DPMPTS tahun 2025	19
Tabel 3. 3	Capaian Sasaran DPMPTS tahun 2025.....	20
Tabel 3. 4	Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025 .	21
Tabel 3. 5	Tabel realisasi program, kegiatan dan sub kegaitan	23
Tabel 3. 6	Perbandingan Realisasi kinerja tujuan Tahun 2025 dengan Tahun 2024	30
Tabel 3. 7	Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024	31
Tabel 3. 8	Capaian Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2022-2025	32
Tabel 3. 9	Perkembangan investasi PMA dan PMDN Kota Banda Aceh selama Tahun 2021- 2025	34
Tabel 3. 10	Capaian IKU tahun 2025 dengan Renstra PD Tahun 2023-2026	35
Tabel 3. 11	Program Pendukung IKU	38
Tabel 3. 12	Instansi dan Layanan pada MPP Kota Banda Aceh	40
Tabel 3. 13	Data Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha .	45
Tabel 3. 14	Jumlah pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP..... 3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Banda Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal. DPMPTSP Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh bertujuan untuk melaksanakan pelayanan dibidang penanaman modal (meningkatkan jumlah investasi dari dalam negeri maupun luar negeri) dan pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, transparan, terpercaya dan berkualitas kepada masyarakat. Selain melaksanakan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan, DPMPTSP Kota Banda Aceh juga berperan sebagai koordinator untuk pengelolaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Banda Aceh.

1. Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, DPMPTSP memiliki:

❖ Tugas

Membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan kepada Kota.

❖ **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, DPMPTSP mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan Walikota.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, DPMPTSP memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

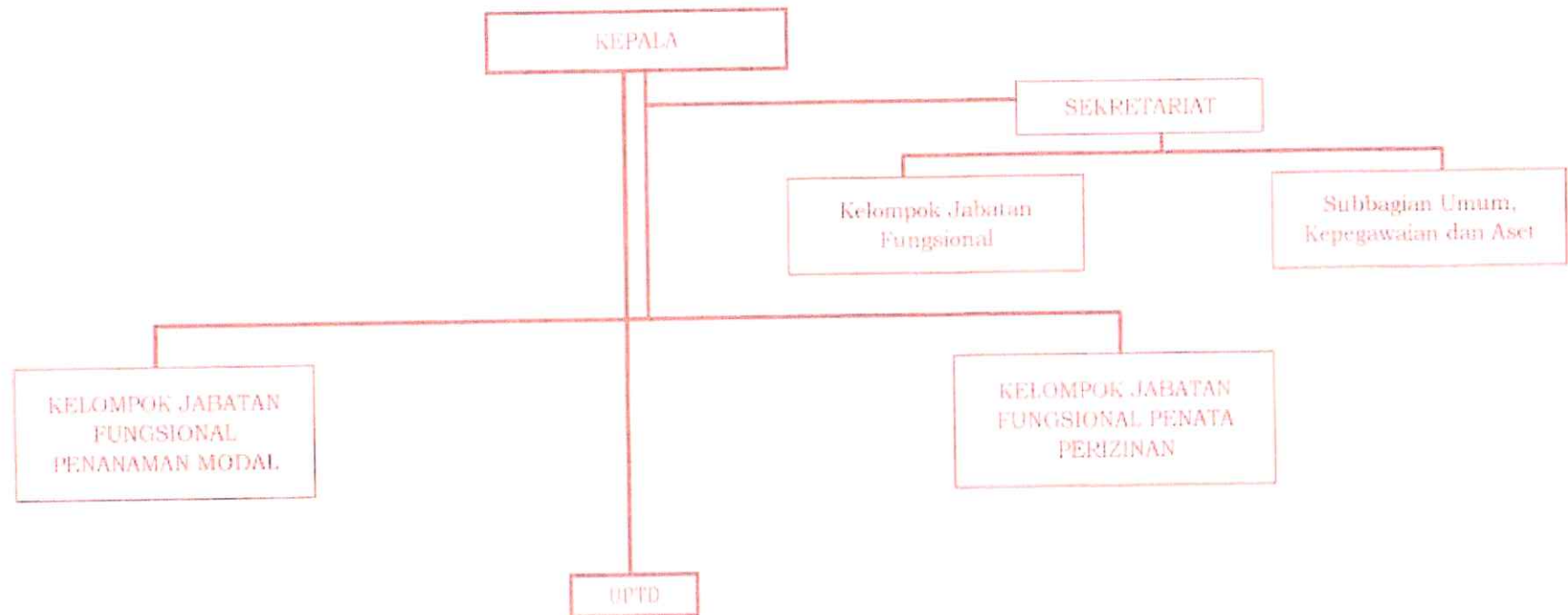
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum, Kepegawaian dan Barang Milik Daerah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
- d. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu satu pintu

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP

BAGAN SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 39 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 Desember 2025 M
2 Rajab 1447 H



Keterangan :

- : Garis Atasan Langsung
- : Garis Pembinaan

3. Sumber Daya DPMPTSP Kota Banda Aceh

Sumber daya merupakan komponen yang penting didalam penyelenggaraan pemerintahan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi, karena sumber daya manusia yang berkualitas dapat membantu pemerintah untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sumber Daya Manusia adalah individu atau tenaga kerja yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan potensi sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Tahun 2025

Tingkat Pendidikan	PNS						PPPK		Jumlah
	Struktural		Fungsional		Pelaksana		L	P	
	L	P	L	P	L	P			
SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	-	0
SMA Sederajat	0	0	0	0	1	1	5	5	12
D-III	0	1	1	0	0	1	0	1	4
S1	3	0	5	7	3	8	6	4	36
S2	0	1	1	3	0	1	0	0	6
S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	2	7	10	4	11	11	10	58

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat Pendidikan tidak ada pegawai DPMPTSP yang memiliki ijazah SMP sederajat, sebanyak 12 (dua belas) orang pegawai berpendidikan SMA sederajat. Ada 4 (empat)

orang pegawai dengan tingkat pendidikan D-III, sebanyak 36 (tigapuluh enam) pegawai berpendidikan sarjana (S1), dan sebanyak 6 (enam) orang pegawai berpendidikan Pasca Sarjana.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan, dan kebutuhan pegawai sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK), disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan ABK

No	Jenis Jabatan	Kebutuhan sesuai ABK	PNS		PPPK		Jumlah	Lebih/ kurang	Ket
			L	P	L	P			
1	Struktural	6	2	2	-	-	4	-2	Kadis belum defenitif
2	JF Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	-1	
3	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	1	2	0	0	0	2	1	
4	JF Analis Keuangan Negara Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	-1	
5	JF Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	-1	
6	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	-1	
7	JF Arsiparis Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1	
8	JF Arsiparis Mahir	2	0	0	0	0	0	-2	
9	JF Arsiparis Terampil	3	0	0	0	0	0	-3	
10	JF Perencana Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	-1	
11	JF Perencana Ahli Pertama	2	0	0	0	0	0	-2	
12	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	-1	
13	JF Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	-1	
14	JF Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	0	-1	

15	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	4	0	4	0	0	3	0
16	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	9	0	1	0	0	1	-8
17	JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	17	1	0	0	0	7	-9
18	JF Penata Perizinan Ahli Madya	6	0	0	0	0	0	-6
19	JF Penata Perizinan Ahli Muda	10	4	0	0	0	4	-6
20	JF Penata Perizinan Ahli Pertama	14	5	0	0	0	5	-9
21	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	3	0	0	3	-1
22	Pengolah Data dan Informasi	22	3	6	0	0	9	-13
23	Penata Layanan Operasional	4	0	0	0	0	0	-4
24	Pengelola Layanan Operasional	2	0	0	0	0	0	-2
25	Pengadministrasi Perkantoran	12	1	1	0	0	2	-10
26	Pengelola Umum Operasional	1	0	0	0	0	0	-1
	TOTAL	128	18	17	0	0	41	-87

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Jumlah pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan kepangkatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah ASN DPMPTSP berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	1	1	2
3	Golongan III	10	16	26
4	Golongan IV	4	5	9
5	Golongan V	4	4	8
6	Golongan VII	-	1	1
7	Golongan IX	7	5	12
JUMLAH		26	32	58

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ASN DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berstatus PNS mempunyai pangkat golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang, 26 (dua puluh enam) orang pegawai mempunyai pangkat golongan III dan sebanyak 2 (dua) orang pegawai mempunyai pangkat golongan II. Adapun ASN DPMPTSP yang berstatus P3K mempunyai golongan V sebanyak 8 orang, golongan VII sebanyak 1 orang dan golongan IX sebanyak 12 orang.

Berdasarkan kasifikasi jabatan pegawai DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	3
4	Kasubbag	1
5	Fungsional	23
6	Pelaksana	29
	JUMLAH	58

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan kualifikasi pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh sudah cukup baik, namun kompetensi aktual pegawai DPMPTSP masih perlu ditingkatkan. Berbagai Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di DPMPTSP, antara lain dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan di DPMPTSP. Saat ini DPMPTSP menempati Gedung pasar Atjeh baru lantai 3 yang pengelolaannya dibawah DISKOPUKMDAG Kota Banda Aceh. Tabel dibawah ini merupakan informasi terkait nilai asset yang dimiliki DPMPTSP yaitu:

Tabel 1. 5
Sarana dan Prasarana DPMPTSP

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.654	7.014.716.393
2	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	54.900.000
3	Aset Tetap Lainnya	13	533.153.500

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

B. Permasalahan Utama (Strategis Issued)

DPMPTSP Kota Banda Aceh memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan terutama di dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal. Isu strategis yang dihadapi DPMPTSP tidak hanya mencerminkan tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pelayanan, tetapi juga menyangkut aspek eksternal seperti perubahan regulasi nasional, tren investasi global, dan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi serta efisiensi birokrasi. Isu strategis yang dihadapi DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem informasi, sarana dan prasarana terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal dengan OPD teknis terkait.
2. Menyederhanakan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan yang ada, dan terobosan pelayanan perizinan berusaha, serta menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga memudahkan proses dan prosedur perizinan dengan tetap memegang norma dan ketentuan perundang-undangan.
3. Keterbatasan anggaran promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal.
4. Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pemantauan, pengendalian penanaman modal.
5. Belum ter-conect-nya Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) kedalam sistem Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha.
6. Belum optimalnya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota dari Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Kota Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, Banda Aceh juga dikenal sebagai Kota Islam tertua di Asia Tenggara. Sebagai ibu kota propinsi, Banda Aceh melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan rencana pembangunan Aceh dan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPD, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2023-2026 yaitu:

1. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal

Untuk lebih jelasnya tujuan beserta indikator tujuan dan target yang ingin dicapai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Indikator Tujuan DPMPTS Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator	Target
1	Mengoptimalkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100%
2	Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.	Persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100%

Sumber : Renstra DPMPSTP 2023-2025

Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 adalah :

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Tabel 2. 2
Sasaran dan Indikator Sasaran DPMPTS Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	90.76
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B

2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.	Persentase Pengembangan Iklim	100%
		Persentase Promosi Penanaman Modal	100%
		Persentase Nilai Penanaman Modal	100%
		Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Tujuan perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, mencapai tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja DPMPTSP merupakan janji kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk untuk melaksanakan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025. Lampiran perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.76
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	630.06 Milyar

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan digunakan formulasi sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapat dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan pada semester I dan semester II Tahun 2025
2. Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

C. Penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP maka ditetapkanlah sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.10.768.034.274,- yang digunakan untuk membiayai belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang/jasa) dan belanja modal. Alokasi anggaran berdasarkan belanja pada DPMPTSP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4
Alokasi anggaran berdasarkan belanja DPMPTS Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran
1	Belanja operasi	10,687,508,874
	Belanja Pegawai	5,520,105,729
	Belanja Barang dan jasa	5,167,403,145
2	Belanja Modal	80,525,400
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,525,400
	Jumlah	10,768,034,274

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan program pada DPMPTSP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah.	9,285,220,274	DAU-PAD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	750,000,000	DAU-PAD
3	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	732,814,000	DAU-PAD
	Total	10,768,034,274	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Alokasi Anggaran berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada DPMPTSP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran
	DPMPTSP				10,768,034,274
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	9,285,220,274
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	%	3,884,500
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5	Dokumen	3,884,500
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	5,520,105,729
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32	Orang/ Bulan	5,520,105,729
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	%	174,151,145
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	602,600
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	36,054,100
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Paket	5,283,000
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	23,999,600
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	5	Laporan	108,211,845
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	80,525,400
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	21	Unit	80,525,400
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2,404,674,500
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12	Laporan	1,292,000,000
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	1,112,674,500
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,101,879,000

1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	Unit	257,006,000
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	41	Unit	173,168,000
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	671,705,000
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	%	750,000,000
2.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	100	%	600,000,000
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	600,000,000
2.2	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100	%	150,000,000
2.2.1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	150,000,000
3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	%	732,814,000
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100	%	732,814,000
3.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	1	Dokumen	732,814,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja seringkali diasosiasikan dengan tolak ukur keberhasilan suatu instansi/organisasi. Setiap instansi/organisasi tentunya berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai target yang optimal. Adapun pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih kinerja (tercapai atau tidak tercapai). Berdasarkan selisih kinerja tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap penyebab ketidaktercapaian atau upaya yang akan dilakukan dimasa depan untuk keberhasilan pencapaian.

Perhitungan capaian kinerja dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Jika ukuran sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan skala ordinal untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Untuk menentukan tingkat capaian kinerja tersebut dibutuhkan suatu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dengan cara mengumpulkan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara umum DPMPTSP Kota Banda Aceh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra DPMPTSP Tahun 2023-2026. Pencapaian Tujuan DPMPTS Kota Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Tujuan DPMPTS tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Tk capaian (%)
1	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100	103,75	103.75
2	Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.	Persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100	73,32	73.32

Ada dua tujuan yang ingin dicapai DPMPTSP yaitu:

Tujuan I: Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Indikator yang digunakan adalah Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2025, terealisasi sebesar 103,75%. Tingkat capaian sebesar 103.75%, dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

Tujuan II: Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Indikator yang digunakan adalah Persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 73.32%. Tingkat capaian sebesar 73.32% , dengan kriteria penilaian sedang. Selain mencapai tujuan, DPMPTSP juga memiliki sasaran kinerja yang ingin dicapai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3
Capaian Sasaran DPMPTS tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Tk.Capaian
1	Optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	90.76	94.17	103.75
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	Belum ada hasil penilaian	-
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.	Persentase Pengembangan Iklim	100%	100	100%
		Persentase Promosi Penanaman Modal	100%	0	0%
		Persentase Nilai Penanaman Modal	100%	0	0%
		Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%	0	0%

Ada dua sasaran Strategis DPMPTS yang ingin dicapai yaitu:

Sasaran strategis I : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator:

- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Penanaman Modal dan Pelyanan terpadu Satu Pintu yang ditargetkan sebesar 90,76 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 94,17. Tingkat capaian sebesar 103,75% , dengan kreteria penilaian *sangat tinggi*. Adapun perhitungan realisasi tahun 2025 didapat dari hasil perhitungan Survei Kepuasan masyarakat di DPMPTSP Kota Banda Aceh selama tahun 2025.

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target nilai B. Namun untuk tahun 2025 belum dilakukan penilaian.

Sasaran strategis II: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator:

- Persentase Pengembangan Iklim, Persentase Promosi Penanaman Modal, Persentase Nilai Penanaman Modal dan Persentase Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja masing-masing indikator adalah 100%. Namun hanya Persentase Pengembangan Iklim yang mencapai realisasi sebesar 100%, adapun tiga indikator lainnya tidak terealisasi secara anggaran namun dalam pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (sasaran strategis) yang telah disepakati DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tk. Capaian
1.	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.76	94,17	103,75
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	630.06 Milyar	461,98 milyar	73,32

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang ditargetkan sebesar 90,76 pada tahun 2025 terealisasi sebesar 94,17.

Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp.630,06 milyar, terealisasi sebesar Rp.461,98 Milyar. Tingkat capaian sebesar 73,32%,

Untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh selama tahun 2025, DPMPTSP telah melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut disajikan capaian realisasi target program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

Tabel 3. 5
Tabel realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian
	DPMPTSP				10,768,034,274	10,140,869,749	94.18
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	9,285,220,274	9,269,248,949	99.83
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	100	%	3,884,500	2,874,500	74.00
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5	Dokumen	3,884,500	2,874,500	74.00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100	%	5,520,105,729	5,729,315,126	103.79
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32	Orang/ Bulan	5,520,105,729	5,729,315,126	103.79
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	%	174,151,145	140,941,675	80.93
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Paket	602,600	602,600	100.00

1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	6	Paket	36,054,100	36,053,500	100.00
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Paket	5,283,000	5,283,000	100.00
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6	Paket	23,999,600	19,379,600	80.75
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	5	Laporan	108,211,845	79,622,975	73.58
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	80,525,400	-	0.00
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	21	Unit	80,525,400	-	0.00
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	2,404,674,500	2,324,659,148	96.67
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang disediakan	12	Laporan	1,292,000,000	1,264,700,000	97.89
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	1,112,674,500	1,059,959,148	95.26
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,101,879,000	1,071,458,500	97.24

1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5	Unit	257,006,000	237,097,500	92.25
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	41	Unit	173,168,000	165,494,000	95.57
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	671,705,000	668,867,000	99.58
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	%	750,000,000	340,338,800	45.38
2.1	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	100	%	600,000,000	202,350,000	33.73
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	Dokumen	600,000,000	202350000	33.73
2.2	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100	%	150,000,000	137,988,800	91.99
2.2.1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	150,000,000	137988800	91.99

3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	%	732,814,000	531,282,000	72.50
3.1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100	%	732,814,000	531,282,000	72.50
3.1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan dan non perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.	1	Dokumen	732,814,000	531282000	72.50

Pada Tahun 2025, ada 3 program yang dilaksanakan oleh DPMPTS yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan. Tingkat capaian realiasi anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 74%, dengan kriteria penilaian *sedang*.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 103.79% dengan kriteria penilaian *sangat tinggi*.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari lima sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 100%,
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 100%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 80,33% dan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 73.58%.

Tingkat rata-rata capaian realisasi anggaran kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah sebesar 90.78% dengan kriteria penilaian *sangat tinggi*.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan

Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 0% dengan kriteria penilaian *sangat rendah*. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tidak dilaksanakan pada tahun 2025 karena efisiensi anggaran.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari dua sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 97.89% dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 95.26%

Tingkat rata-rata capaian realisasi anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah adalah sebesar 96.57%, dengan kriteria penilaian *sangat tinggi*

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 92.25%.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 95.37% dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 99.58% .

Tingkat rata-rata capaian realisasi anggaran kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar 95.73% dengan kriteria penilaian *sangat tinggi*.

3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari dua kegiatan dan dua sub kegiatan. Tingkat capaian realiasi anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 33.73%, dengan kriteria penilaian *sangat rendah*.
- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari satu sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 91.99%, dengan kriteria penilaian *sangat tinggi*

3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan. Tingkat capaian realiasi anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari satu sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 72.50%, dengan kriteria penilaian *sedang*.

2. Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tujuan Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi kinerja tujuan tahun 2024.

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi kinerja tujuan Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator	Realisasi (%)		Meningkat/ menurun
			2024	2025	
1	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	104	103,75	(0,25)
2	Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.	Persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	103,60	73,32	(30,28)

Sumber : Renstra Tahun 2023-2026

Capaian kinerja tujuan tahun 2025 pada indikator Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah sebesar 103,75% berkurang 0,25% dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 104%. Namun demikian pengurangan ini tidak berdampak signifikan. Adapun terhadap indikator tujuan persentase peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 30,28% apabila

dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu dari 103,60% mengalami penurunan menjadi 73,32% pada tahun 2025 .

Adapun perbandingan realisasi kinerja sasaran Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Kenaikan/ Penurunan
1	Optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	94.02	94.17	0.15
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	Belum ada hasil penilaian	-
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.	Persentase Pengembangan Iklim	0	100	100%
		Persentase Promosi Penanaman Modal	100%	0	(100)
		Persentase Nilai Penanaman Modal		0	0%
		Persentase Pelayanan Penanaman Modal	100%	0	(100)

Sumber : Renstra Tahun 2023-2026

Capaian kinerja sasaran untuk indikator indeks kepuasan masyarakat untuk tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,15 dibandingkan dengan tahun 2024, sedangkan untuk indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) belum dapat dibandingkan. Adapun capaian kinerja sasaran untuk Persentase Pengembangan Iklim meningkat 100%, sedagkan indicator Persentase Promosi Penanaman Modal dan Persentase Pelayanan

Penanaman Modal masing-masing menurun 100%. Adapun Persentase Nilai Penanaman Modal untuk tahun 2024 dan tahun 2025 tidak dilaksanakan secara anggaran.

Data perkembangan realisasi kinerja selama kurun waktu tahun 2022-2025 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Capaian Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2022-2025

No.	Indikator	Realisasi			
		2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,29	93,73	94,02	94.17
2	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	433,88 Milyar	573,54 Milyar	624,38 Milyar	461,98 Milyar

Sumber: Bidang Penanaman Modal

Dari tabel diatas dapat lihat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Mall Pelayanan Publik selama tahun 2022-2025 terus meningkat setiap tahunnya, Ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh berada pada kategori *sangat baik*. Namun demikian dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan masih ada masukan kualitatif dari masyarakat terkait harapan peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum agar pelayanan lebih optimal. Selain itu kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan belum optimal, sehingga dibutuhkan pelatihan/*coaching* untuk peningkatan kapasitas petugas di *front office*.

Perkembangan nilai investasi berskala nasional PMDN/MPA juga terus meningkat selama tahun 2022-2024, namun mengalami penurunan pada tahun 2025. Salah satu penyebab turunnya nilai investasi berskala nasional di Kota Banda Aceh pada Tahun 2025 adalah tingkat kepatuhan penyampaian

LKPM oleh pelaku usaha/investor masih rendah karena masih banyak pelaku usaha/investor yang belum mengerti tata cara penginputan LKPM melalui sistem OSS. Perkembangan investasi PMA dan PMDN Kota Banda Aceh selama Tahun 2021- 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 9
Perkembangan investasi PMA dan PMDN Kota Banda Aceh selama Tahun 2021- 2025

No	Sektor Usaha	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		TAHUN 2025	
		Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	Total Proyek	Total Tambahan Investasi (Rp)
1.	PMA	1058	Rp 198,896,350,695	8	Rp 58,301,919,266	52	Rp 37,109,993,756	150	Rp 139,147,874,680.00	78	Rp 79,561,134,609
2.	PMDN	23	Rp 348,985,819,012	640	Rp 375,577,559,829	3474	Rp 536,425,559,412	6446	Rp 485,231,789,306.00	2195	Rp 382,415,449,060
	Jumlah Seluruhnya	1081	Rp 547,882,169,707	648	Rp 433,879,479,095	3526	Rp 573,535,555,168	6596	Rp 624,379,663,986.00	2156	Rp 461,976,583,669

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target Renstra Tahun 2023-2026

Rencana kerja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke 3 renstra DPMPTSP Tahun 2023-2026. Berikut adalah perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra PD Tahun 2023-2026. Perbandingan realisasi kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3. 10
Capaian IKU tahun 2025 dengan Renstra PD Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi tahun 2025	Tingkat capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.76	94,17	103.75
Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	630.06 Milyar	461,98 Milyar	73,32

Sumber: Bidang Penanaman Modal

Capaian IKU DPMPTS Tahun 2025 dibandingkan dengan target capaian kinerja pada Renstra PD tahun 2023-2026, ada satu indikator yang tidak tercapai yaitu Nilai Investasi Berskala Naasional PMDN/PMA dan ada satu indikator yang capainya melebihi target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Adapun analisis keberhasilan atau kegagalan berdasarkan capaian yang telah disajikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

Indeks kepuasan masyarakat tercapai melebihi target dengan tingkat capaian 103,75%:

- Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh adalah 94,17 dengan kategori sangat baik, namun masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki pada masa-masa yang akan datang.

- Masukan kualitatif dari masyarakat mengenai pelayanan di DPMPTSP Kota Banda Aceh menunjukkan harapan peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Masyarakat secara khusus mengusulkan agar DPMPTSP meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum agar pelayanan lebih optimal.
- Kekurangan juga terdapat pada unsur kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan, sehingga dibutuhkan pelatihan/*coaching* untuk peningkatan kapasitas petugas di *front office*.

Sepanjang tahun 2025, iklim investasi di Kota Banda Aceh menghadapi tantangan yang cukup kompleks, yang tercermin dari capaian realisasi investasi tahun 2025 yang tidak tercapai. Realisasi capaian nilai investasi hanya sebesar 73,62% dari target yang ditetapkan. Meskipun secara umum provinsi Aceh mencatat pertumbuhan, Kota Banda Aceh sebagai pusat jasa dan perdagangan memiliki karakteristik hambatan yang spesifik:

- Dominasi Sektor Informal dan Kepatuhan Administratif (LKPM) Permasalahan utama terletak pada rendahnya kesadaran pelaku usaha khususnya skala menengah-kecil dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Banyak usaha di sektor perdagangan dan jasa yang secara fisik berjalan pesat, namun tidak tercatat secara administratif di sistem OSS-RBA. Hal ini menyebabkan "gap" yang lebar antara aktivitas ekonomi nyata di lapangan dengan data realisasi yang dilaporkan.
- Isu Non-Teknis dan Persepsi Risiko Tantangan non-teknis masih mendominasi, termasuk minimnya aktivitas ekonomi berkelanjutan yang mampu menarik minat investor asing (PMA). Kota Banda Aceh masih sangat bergantung pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai lebih dari 95% dari total investasi. Kurangnya daya tarik dari investor luar dan isu stabilitas kebijakan lokal yang belum memadai terkadang membuat investor besar bersikap *wait and see*.
- Keterbatasan Lahan dan Infrastruktur Penunjang Sebagai wilayah perkotaan yang padat, ketersediaan lahan untuk ekspansi industri atau proyek besar sangat terbatas. Hal ini memaksa investasi di Banda Aceh terkonsentrasi hanya pada sektor padat modal yang minim penyerapan

tenaga kerja, atau sektor jasa yang nilai investasinya tidak sebesar sektor manufaktur/pertambangan di kabupaten lain di Aceh.

- Kendala Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor Meskipun sistem perizinan berbasis digital (OSS-RBA) telah diterapkan, koordinasi dalam penyelesaian hambatan (debottlenecking) terkait tata ruang dan izin teknis lainnya masih sering mengalami perlambatan. Hal ini menyebabkan beberapa rencana investasi yang sudah masuk tahap komitmen gagal dieksekusi tepat waktu pada tahun 2025.

Secara garis besar penurunan realisasi sebesar 26,38% dari target di tahun 2025 bukan semata-mata karena hilangnya minat investasi, melainkan lebih disebabkan oleh kendala administratif pelaporan (LKPM) serta hambatan teknis terkait tata ruang dan ketersediaan lahan di wilayah perkotaan."

5. Analisis proses/strategi yang berdampak terhadap efisiensi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran guna mewujudkan kinerja yang baik, DPMPTSP Kota Banda Aceh didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Program yang menunjang IKU Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026)

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran DPMPTSP melalui capaian indikator kinerja utama maka dibutuhkan dukungan anggaran. Berikut program-program yang mendukung pelaksanaan IKU:

Tabel 3. 11
Program Pendukung IKU

NO.	Nama program	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Tingkat Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	9.285.220.274	9.269.248.949	99,83
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	750.000.000	340.338.800	45,38
3	Program Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.	732.814.000	531.282.000	72,50
	Jumlah	10.768.034.274	9.269.248.949	94,18

Sumber : LRA Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan DPMPTSP membutuhkan anggaran. Anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 10.768.034.274,- yang terdiri dari tiga program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program-program tersebut dijabarkan dalam sembilan kegiatan dan enam belas sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- 7. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 8. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

B. Capaian Kinerja Lainnya

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan publik di MPP adalah Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2017, adapun regulasi yang mengatur terkait pelayanan di MPP Kota Banda Aceh ialah Penandatanganan Komitmen Walikota Banda Aceh dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Mal Publik Kota Banda Aceh.

Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 31 Instansi yang terdiri dari 7 instansi Pemko Banda Aceh dan 22 instansi vertikal dan 2 instansi vertikal yang akan hadir dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 12
Instansi dan Layanan pada MPP Kota Banda Aceh

NO	INSTANSI	JENIS LAYANAN
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	- Layanan PBG - Layanan Sicantik Cloud - Helpdesk OSS - Layanan Mandiri OSS - Layanan Mandiri LKPM - Layanan Informasi & Pengaduan
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	- Layanan KK, KTP-el & KIA - Layanan Akta kelahiran & Akat Kematian - Layanan Surat Ket. Pencatatan Sipil - Layanan Data Kependudukan - Layanan Surat Ket. Pengangkatan Anak - Layanan Surat Ket. Pengganti Identitas - Layanan Surat Keterangan Pindah (SKP) - Layanan Akta Perkawinan & Akta Perceraian - Layanan Akta Pengakuan & Pengesahan Anak - Layanan Informasi & Pengaduan
3.	Baitul Mal kota Banda Aceh	- Layanan ZIS - Konsultasi Informasi & Konsultasi
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	- Layanan PBB - Layanan Pajak Daerah (NPWPD) - Layanan Informasi & Pengaduan
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	- Layanan Retribusi Sampah - Layanan Kebersihan - Layanan Penyedotan Tinja - Layanan Pemasangan Perbaikan Lampu Jalan - Layanan Pemangkasan Pohon - Layanan Sewa Alat Berat - Layanan Sewa Taman Sari - Layanan Rekomendasi Lingkungan

		- Layanan Izin Magang/ Penelitian - Layanan sampah medis
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	- Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) - Layanan Informasi & Pengaduan
7.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	- Layanan Pendaftaran Rencana Tapak/Site Plan Perumahan - Layanan Informasi & Konsultasi
8.	BP Jamsostek	- Pendaftaran Perusahaan Baru - Layanan Pengecekan Tunggalan Iuran - Layanan Informasi & Pengaduan
9.	Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh	- Layanan Perpanjangan SKCK - Layanan Laporan Kehilangan Barang - Layanan Informasi & Pengaduan
10.	Kejaksanaan Negeri Kota Banda Aceh	- Pembayaran Denda - Pembayaran Bukti Tilang - Layanan Konsultasi Hukum Gratis
11.	Samsat, BPKA & Jasa Raharja	- Pembayaran PKB - Perpanjangan STNK Tahunan - Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) - Layanan Informasi & Pengaduan
12.	PT. TASPEN (Persero)	- Layanan Kartu Taspen - Layanan Pengajuan Berkas Klim - Layanan Estimasi Hak Peserta - Otentikasi Peserta Pensiun - Layanan Pendaftaran Enrollment - Informasi Layanan Klim - Layanan Informasi & Pengaduan
13.	PT. PLN (Persero)	- Permohonan Pemasangan Baru - Permohonan Penambahan Daya - Layanan Aplikasi PLN Mobile - Layanan Informasi & Pengaduan
14.	BPJS Kesehatan	- Layanan Pendaftaran Baru - Layanan Pergantian Kartu - Layanan Perubahan Data - Layanan Perubahan Faskes - Layanan Perubahan Status - Layanan Pendaftaran Bayi Baru Lahir - Layanan Kartu Non Aktif - Layanan Perpanjangan Masa Aktif Kartu Anak - Layanan Informasi & Pengaduan

15.	Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh	- Layanan Haji - Layanan Pernikahan - Layanan Pengukuran Arah Kiblat - Layanan Wakaf - Layanan Informasi & Pengaduan
16.	PDAM	- Pembayaran Rekening Air - Pemasangan Baru - Layanan Informasi & Pengaduan
17.	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	- Layanan Pembuatan Paspor Baru - Layanan Pembuatan Paspor Penggantian - Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI - Layanan Informasi & Pengaduan
18.	PT. POS Indonesia (Persero)	- Layanan Pengiriman - Menerima Pembayaran PLN, PDAM, Pulsa, Telkom, Multifinance & OLSHOP - Menerima pembayaran pajak penerimaan negara dan penerimaan daerah - Penjualan Materai 3000 & 6000 - Layanan Informasi & Pengaduan
19.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	- Pendaftaran NPWP Secara Online - Layanan Aktivasi EFIN - Layanan Pembuatan Kode e-Billing - Layanan Informasi KSWP - Asistensi Layanan Mandiri - Layanan Informasi dan Konsultasi
20.	PT. LKMS Mahirah Muamallah	- Layanan Pembukaan Rekening - Layanan Penyetoran dan Penarikan - Pengajuan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro - Layanan Informasi & Pengaduan
21.	PT. Bank Aceh	- Layanan Penyetoran dan Penarikan - Menerima Pembayaran Penerimaan Negara & Daerah - Menerima Pembayaran PKB - Menerima Pembayaran Perguruan Tinggi (Unsyiah & UIN) - Menerima Pembayaran & Pembelian Voucher, Pulsa & Wifi
22.	Pengadilan Negeri	- Layanan permohonan perwalian - Layanan permohonan ganti nama - Layanan permohonan perbaikan akta kelahiran - Surat keterangan di pengadilan - Layanan Informasi & Pengaduan

23.	GAPKAINDO (Asosiasi)	- Layanan SBU (sertifikat Badan Usaha) - Layanan SKA (sertifikat Keahlian) - Layanan SKT (sertifikat Keterampilan)
24.	BPOM	- Layanan Perizinan SKI/SKE - Layanan Pendamping Registrasi Produk Obat dan makanan - Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga - Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan
25.	Pegadaian	- Layanan Booking Gadai - Layanan perpanjang Gadai - Layanan cicil Gadai - Layanan tebus gadai - Layanan pembiayaan usaha - Layanan pembiayaan porsi haji - Layanan cicil kendaraan - Layanan cicil emas - Layanan tabung emas - Layanan Informasi & Pengaduan
26.	BNN	- Konsultasi Rehabilitasi - Layanan Sosialisasi - Layanan SKHPN Layanan Tes Urine - Rehabilitasi Rawat Jalan - Layanan Informasi & Pengaduan
27.	BEA CUKAI	- Layanan pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk perangkat komunikasi yang dibawa dari luar negeri - Layanan pembuatan kode e-Billing - Layanan informasi asistensi ekspor bagi UMKM - Layanan informasi ketentuan barang Kena Cukai - Layanan informasi ketentuan barang kiriman dari luar negeri - Sosialisasi ketentuan barang bawaan penumpang dari luar negeri - Layanan informasi & pengaduan
28.	BSI	- Layanan pembukaan rekening - Layanan setor dan tarik tunai
29.	BSPJI	- Layanan pengujian produk - Layanan sertifikasi produk - Layanan pemeriksaan halal - Layanan sertifikasi industry hijau - Layanan verifikasi TKDN - Layanan sertifikasi produk

		- Layanan Kalibrasi - Layanan pelatihan - Layanan konsultasi
30.	BTN	
31.	KEMENKUMHAM	- Instansi yang akan hadir

Berikut Data realisasi layanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Tahun 2025 pada DPMPTSP Kota Banda Aceh:

Tabel 3. 13
Data Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha

No.	Nama Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
A	Perizinan Berusaha													
1	Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	184	118	113	87	114	115	189	379	313	641	329	373	2955
B	Non Perizinan Berusaha													
1	Izin Reklame	8	10	7	13	15	21	10	5	23	31	17	18	178
2	Izin Operasional Kesehatan	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4
3	Izin Tenaga Kesehatan	292	235	192	164	240	182	187	213	217	295	155	205	2577
4	Izin Pendidikan	9	6	11	2	4	9	12	5	10	8	16	3	95
5	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	36	35	22	25	44	27	48	47	32	30	52	26	424
JUMLAH TOTAL		530	404	346	291	418	354	447	649	595	1005	569	625	6233

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk KemenPANRB sebagai *pilot project* MPP. DPMPTSP Kota Banda Aceh bertanggungjawab terhadap pelayanan pada MPP Kota Banda Aceh. MPP kota Banda Aceh merupakan MPP keempat di Sumatera setelah Padang, Pekanbaru, dan Batam. Hadirnya MPP ini untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan publik terpadu pada satu tempat. Mulai dari buat KTP, SIM, Paspor, bayar pajak, BPJS, serta Pelayanan Kemenag bahkan untuk pelaksanaan layanan pernikahan dapat dilaksanakan di MPP Kota Banda Aceh.

Untuk ruang Fasilitas Umum pada MPP Kota Banda Aceh terdiri dari Perbankan, Mushalla, Klinik, Layanan Mandiri, Pojok Baca, Pelaminan, Galery Charger, Fasilitas Disabilitas, Ruang Bermain Anak, Tempat Parkir Rooftop, Informasi Center dan Ruang Laktasi. Jumlah pengunjung MPP setiap tahunnya terus meningkat. Berikut data jumlah pengunjung MPP Tahun 2025.

Tabel 3. 14
Jumlah pengunjung MPP Kota Banda Aceh berdasarkan Gender

BULAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
JANUARI	5397	4296	9693
FEBRUARI	3887	3230	7117
MARET	2864	2186	5050
APRIL	3491	2576	6067
MEI	4424	3303	7727
JUNI	4581	3613	8194
JULI	2207	1903	4110
AGUSTUS	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	0	0	0
JUMLAH	26851	21107	47958

	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
PERSEN	56%	44%	100%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DMPTSP Kota Banda Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam merealisasikan rencana-rencana yang telah disusun dalam Renstra (Rencana Strategis) dan dilaksanakan pada tahun 2025.

LKjiP DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2025 menggambarkan capaian indikator kinerja tujuan, sasaran dan kinerja utama serta capaian kinerja program dan realisasi anggaran. Hasil evaluasi capaian kinerja menunjukkan tingkat capaian kinerja yang baik, meskipun ada satu indikator kinerja yang belum tercapai yaitu Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA.